



Analisis Komunikasi Politik Pemangku Adat Minangkabau

M.A. Dalmenda¹⁾, M. Fedro Syafiola²⁾

Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, Sumatera Barat¹⁾
Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, Sumatera Barat²⁾

Corresponding author: Dalmenda@soc.unand.ac.id

Abstrak

Transformasi komunikasi politik dalam kepemimpinan adat Minangkabau mencerminkan dinamika kompleks antara pelestarian budaya dan modernisasi. Menggunakan etnografi kritis dan paradigma konstruktivis, penelitian ini mengkaji bagaimana pemimpin tradisional menavigasi antara otoritas budaya dan partisipasi politik. Temuan mengungkapkan pergeseran signifikan dalam pola komunikasi, ditandai dengan politisasi lembaga adat dan munculnya hubungan transaksional. Transformasi ini telah menyebabkan perubahan fundamental dalam proses pengambilan keputusan dan menantang keberlanjutan sistem tata kelola tradisional. Penelitian merekomendasikan pengembangan mekanisme tata kelola yang dapat mengakomodasi modernisasi sambil mempertahankan integritas budaya Minangkabau.

Kata kunci: Kepemimpinan, Komunikasi Politik, Minangkabau, dan Otoritas Tradisional dan Transformasi Budaya

Abstract

The transformation of political communication in Minangkabau Indigenous leadership reflects the complex dynamics between cultural preservation and modernization. Using critical ethnography and Constructivist paradigms, this study examines how traditional leaders navigate between cultural authority and political participation. The findings reveal a significant shift in communication patterns, marked by the politicization of indigenous institutions and the emergence of transactional relationships. This transformation has led to fundamental changes in decision-making processes and challenged the sustainability of traditional governance systems. The research recommends the development of governance mechanisms that can accommodate modernization while maintaining the integrity of Minangkabau culture.

Keyword: Leadership, Political Communication, Minangkabau, and Traditional Authority and Cultural Transformation

PENDAHULUAN

Di daerah Kubang Tigo Baleh, Solok, terdapat perpaduan yang khas dalam sistem pengelolaan tradisional Minangkabau yang menggabungkan unsur tradisi adat, sistem politik, dan ajaran Islam. Tokoh-tokoh adat di wilayah ini tidak hanya berperan menjaga kelestarian tradisi, tetapi juga terlibat aktif dalam perkembangan sistem demokrasi kontemporer (Witrianto & Arfinal, 2018). Sejak Indonesia meraih kemerdekaan, fungsi para pemuka adat mengalami perkembangan yang berarti. Dimulai dengan pembentukan MTKAAM (Partai Politik Pemimpin Adat) di tahun 1945, hingga saat ini di mana tokoh-tokoh adat turut berpartisipasi dalam pemilihan umum dan aktivitas politik modern (Asnan, 2007).

Dinamika politik pemimpin adat Minangkabau telah berkembang secara signifikan sejak masa kemerdekaan Indonesia. Pada awal revolusi, para pemimpin adat membangun pengaruh politik melalui MTKAAM (Majelis Tinggi Hubungan Adat Alam Minangkabau) di Padang Panjang pada tanggal 21 Desember 1945, dengan tujuan mempersatukan ninik mamak untuk partisipasi

politik yang lebih besar. Namun, keterlibatan politik ini menghadapi tantangan selama Pemberontakan PRRI, yang menyebabkan pembubaran MTKAAM oleh Presiden Soekarno pada tahun 1960, menandai perubahan signifikan dalam hubungan antara otoritas tradisional dan kekuasaan negara (Asnan, 2007).

Hubungan antara kepemimpinan adat dan kekuasaan politik menjadi lebih kompleks pada era Orde Baru, ketika para pemimpin adat yang memegang jabatan di LKAAM (Lembaga Kedudukan Adat Alam Minangkabau) di tingkat provinsi dan kabupaten secara otomatis diberikan kursi di DPRD melalui Partai Golkar. Pelembagaan otoritas tradisional dalam struktur politik modern ini menciptakan dinamika kekuasaan dan pengaruh baru. Namun, era reformasi pasca 1999 melihat penghapusan representasi politik otomatis ini, memaksa para pemimpin adat untuk bersaing dalam proses demokrasi seperti politisi lainnya (Hidayat et al., 2017).

Penguatan kembali konsep ABS-SBK (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah) memunculkan berbagai diskusi, terutama pasca digelarnya sebuah acara di Bukit Marapalam pada Desember 2018. Acara yang dihadiri oleh pemangku adat, tokoh agama, dan perwakilan pemerintah tersebut menimbulkan perbincangan mengenai pemanfaatan budaya untuk kepentingan politik serta bagaimana posisi pemimpin adat dalam sistem pemerintahan saat ini (Witrianto & Arfinal, 2018).

Keterlibatan pemimpin adat dalam politik praktis menimbulkan tantangan yang signifikan dalam menjaga keseimbangan antara kepemimpinan budaya dan keterlibatan politik (Putri & Hidayat-sardini, 2022). Hal ini terutama terlihat dalam kasus-kasus di mana para pemimpin tradisional menjadi politisi aktif, seringkali mengakibatkan berkurangnya efektivitas dalam peran budaya mereka dan menciptakan perpecahan dalam komunitas mereka. Situasi tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar tentang keberlanjutan struktur kepemimpinan tradisional dalam konteks demokrasi modern (Srisaparmi & Fitriisa, 2024).

Dinamika yang berkembang antara otoritas tradisional dan kekuasaan politik di Minangkabau menyajikan studi kasus unik tentang bagaimana sistem pemerintahan adat beradaptasi dengan proses demokrasi modern. Fenomena ini memerlukan penyelidikan yang lebih dalam tentang bagaimana para pemimpin adat menavigasi antara tanggung jawab budaya dan aspirasi politik mereka, dengan tetap menjaga keutuhan warisan budaya dan tradisi demokrasi Minangkabau yang unik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji interaksi kompleks tersebut dan implikasinya terhadap pelestarian budaya dan pembangunan demokrasi di Sumatera Barat.

Signifikansi penelitian terletak pada pemeriksaan bagaimana pemimpin adat menavigasi antara tanggung jawab budaya dan aspirasi politik mereka, terutama mengingat sistem matrilineal dan tradisi demokrasi Minangkabau yang unik. Penelitian ini bertujuan untuk memahami implikasi dari peran ganda ini bagi pelestarian budaya dan pembangunan demokrasi di Sumatera Barat, mengatasi kesenjangan dalam keilmuan yang ada yang terutama berfokus pada aspek budaya Minangkabau daripada dinamika politiknya.

Menurut penelitian (Philipus, 2018) Studi ini mengkaji bagaimana praktik komunikasi bisnis yang etis bersinggungan dengan nilai-nilai budaya tradisional dalam lingkungan organisasi kontemporer. Melalui kerangka analisis kritis, studi ini mengeksplorasi bagaimana para pemimpin bisnis menavigasi antara persyaratan komunikasi korporat modern dan norma budaya yang mapan sambil mempertahankan standar etika. Temuan ini mengungkapkan bahwa komunikasi bisnis yang sukses dalam konteks budaya yang beragam memerlukan pertimbangan yang cermat terhadap prinsip-prinsip etika universal dan nilai-nilai budaya lokal, terutama di bidang-bidang di mana struktur hierarki tradisional memengaruhi perilaku organisasi. Studi ini menekankan bahwa komunikasi bisnis yang etis harus menyeimbangkan tujuan efisiensi dan profitabilitas dengan kepekaan budaya dan tanggung jawab moral, menunjukkan bahwa organisasi harus mengembangkan kerangka komunikasi yang mengintegrasikan standar profesional dengan penghormatan budaya dan pertimbangan etika. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efektivitas bisnis tetapi juga berkontribusi pada pembangunan hubungan yang berkelanjutan lintas batas budaya.

Sementara itu (Havifi et al., 2023), menurut kajian tersebut mengkaji model komunikasi Humas Pemerintah di Nagari III Koto Aur Malintang, Sumatera Barat yang mendapat pengakuan sebagai negara "informatif" oleh Komisi Penerangan Sumatera Barat. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Kantor Humas Pemerintah yang beroperasi melalui Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) menerapkan empat model komunikasi yang berbeda: Kantor Pers, Informasi Publik, Asimetris dua arah, dan simetris dua arah. Instagram Facebook, TikTok), dan ruang publik tradisional seperti lapau (kedai kopi). Pemerintah Nagari telah berhasil mengintegrasikan alat komunikasi digital modern dengan metode tradisional pelibatan masyarakat, terutama terlihat dari transparansi penanganan program pembangunan desa, pengelolaan keuangan, dan pelayanan publik. Pendekatan inovatif mereka menggabungkan komunikasi kelembagaan melalui saluran formal dengan praktik komunikasi budaya, memungkinkan aliran informasi yang efektif antara pemerintah dan anggota masyarakat. Keberhasilan model komunikasi ini ditunjukkan oleh pencapaiannya dalam transparansi Informasi Publik dan kemampuannya untuk menjaga hubungan yang kuat dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk tokoh adat, organisasi pemuda, dan masyarakat umum, yang pada akhirnya berkontribusi pada pembangunan dan kemajuan desa. sebagai Nagari mandiri.

Menurut (Kurnia et al., 2022) menyelidiki pola komunikasi politik anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan fenomenologis kualitatif dengan paradigma konstruktivis, penelitian ini menganalisis bagaimana anggota dewan berkomunikasi dan memperjuangkan aspirasi konstituen melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Temuan tersebut mengungkapkan bahwa komunikasi terjadi secara dialogis, memungkinkan semua pihak-mulai dari politisi hingga aktivis dan mitra-untuk bertindak sebagai komunikator dan komunikasi hampir secara bersamaan. Studi tersebut mengidentifikasi bahwa aspirasi masyarakat menjadi pesan utama dalam komunikasi politik di seluruh upaya advokasi anggota dewan. Penelitian ini menemukan tiga saluran komunikasi utama yang digunakan: komunikasi massa, komunikasi antarpribadi, dan komunikasi organisasi. Hambatan-hambatan utama yang teridentifikasi antara lain perubahan peraturan dan perlunya sinkronisasi antara peraturan pemerintah pusat, kota/kabupaten, dan provinsi terkait kewenangan aspirasi, serta keselarasan dengan program kerja instansi terkait dan RPJMD. Studi ini juga menyoroti bahwa jangka waktu satu tahun yang panjang seringkali mempersulit upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mendesak, yang menunjukkan kompleksitas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pola komunikasi politik tokoh adat Minangkabau dalam konteks demokrasi lokal, dengan fokus pada bagaimana peran ganda mereka sebagai otoritas budaya dan aktor politik berdampak pada kohesi masyarakat nagari.

Penelitian komunikasi politik dan budaya pemangku kepentingan Adat di Minangkabau ini menghadirkan inovasi dan perbedaan yang signifikan dari penelitian sebelumnya dalam beberapa hal utama. Penelitian sebelumnya biasanya meneliti aspek sejarah dan tradisi budaya sebagai entitas yang terpisah, sementara penelitian ini secara unik mengeksplorasi persimpangan dinamisnya dalam konteks transformasi digital. Penelitian ini membuka jalan baru dengan menyelidiki bagaimana para pemimpin tradisional menavigasi antara melestarikan keaslian budaya dan beradaptasi dengan proses demokrasi modern melalui platform digital. Ini memberikan wawasan baru tentang bagaimana teknologi digital membentuk kembali pola komunikasi tradisional dan dinamika kekuasaan dalam masyarakat Minangkabau. Aspek yang sangat baru adalah pemeriksaannya terhadap dampak transformasi digital terhadap peran gender dan partisipasi dalam sistem komunikasi tradisional, terutama bagaimana platform digital menciptakan peluang baru bagi keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan masyarakat-bidang yang sebelumnya belum dijelajahi dalam studi Minangkabau. Analisis komprehensif studi ini tentang bagaimana sistem tata kelola adat beradaptasi dengan modernisasi sambil mempertahankan integritas budaya membuatnya sangat berharga untuk memahami pelestarian budaya yang berkelanjutan di era digital. Fokusnya pada integrasi nilai-nilai tradisional dengan metode komunikasi modern menawarkan wawasan praktis bagi

masyarakat adat lainnya yang menghadapi tantangan serupa dalam menyeimbangkan pelestarian budaya dengan kemajuan teknologi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi kritis dalam paradigma konstruktivis, mengkaji bagaimana pola komunikasi dan dinamika kekuasaan membentuk interaksi antara otoritas tradisional dan proses politik dalam masyarakat Minangkabau. Paradigma konstruktivis memandang realitas sebagai konstruksi sosial melalui makna dan pengalaman bersama, terutama relevan ketika mempelajari bagaimana pemimpin tradisional menavigasi antara bidang budaya dan politik (Sugiyono & Lestari, 2021).

Dalam kerangka penelitian ini, pendekatan etnografi kritis sejalan dengan metodologi kualitatif Moleong dengan menekankan pentingnya memahami fenomena sosial melalui lensa pengalaman hidup peserta. Paradigma konstruktivis memungkinkan peneliti mengkaji bagaimana pemimpin adat dalam masyarakat Minangkabau mengkonstruksi dan menegosiasikan peran ganda mereka melalui interaksi sosial dan makna budaya bersama. Pendekatan metodologis ini mengakui bahwa realitas tidak tetap melainkan dibangun melalui interaksi berkelanjutan antara struktur otoritas tradisional dan proses politik modern, sehingga sangat cocok untuk mempelajari dinamika kompleks hubungan kekuasaan dalam pemerintahan tradisional Minangkabau (Moleong, 2017).

Desain penelitian menggabungkan elemen-elemen kunci etnografi kritis, dengan fokus pada bagaimana struktur kekuasaan dan pola komunikasi memengaruhi hubungan antara kepemimpinan tradisional dan partisipasi politik. Mengikuti kerangka interpretatif Moleong, penelitian ini menekankan pentingnya deskripsi yang kental dan pemahaman kontekstual, khususnya dalam mengkaji bagaimana pemangku adat menavigasi antara tanggung jawab budaya dan aspirasi politik mereka. Metodologi ini mengakui bahwa pengetahuan dikonstruksi secara sosial melalui interaksi para peneliti dan peserta, memungkinkan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana para pemimpin tradisional menafsirkan dan menanggapi tantangan proses demokrasi modern sambil mempertahankan otoritas budaya mereka (Creswell, 2018). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara kritis dinamika kekuasaan dan transformasi sosial yang terjadi dalam masyarakat Minangkabau dengan tetap menjaga kepekaan terhadap konteks budaya lokal dan sistem nilai tradisional.

Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi kritis dalam paradigma konstruktivis, mengkaji bagaimana pola komunikasi dan dinamika kekuasaan membentuk interaksi antara otoritas tradisional dan proses politik dalam masyarakat Minangkabau. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria: (1) pemimpin adat yang aktif dalam pengambilan keputusan budaya dan politik, (2) tokoh masyarakat yang memahami dinamika kekuasaan lokal, dan (3) perwakilan perempuan adat untuk memastikan perspektif gender terwakili. Jumlah informan ditetapkan secara fleksibel sesuai prinsip kecukupan data, yaitu sekitar 10–15 orang yang dianggap paling mengetahui fenomena yang diteliti (Sugiyono, 2018). Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi, yang dilakukan secara triangulasi untuk meningkatkan validitas temuan (Moleong, 2017). Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami konstruksi sosial melalui interaksi dan makna budaya yang dinegosiasikan oleh pemimpin adat dalam konteks politik modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Komunikasi top-down dan instruktif

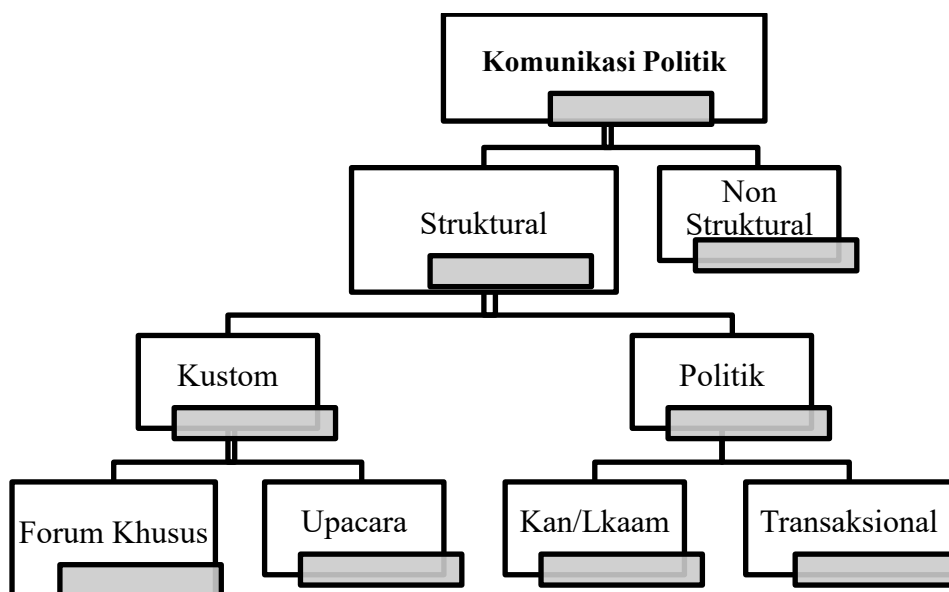
Komunikasi politik yang terjadi di dalam masyarakat Minangkabau, khususnya di wilayah Kubang Tigo Baleh, memiliki karakteristik unik yang menggabungkan unsur tradisional dan modern. Sistem komunikasi ini terbagi menjadi dua bentuk utama yaitu struktural dan non-struktural, di mana masing-masing memiliki peran dan fungsi yang berbeda dalam dinamika politik lokal. Bentuk struktural sendiri terbagi lagi menjadi dua kategori yaitu kustom dan politik, yang mencerminkan kompleksitas interaksi antara adat dan sistem politik modern.

Dalam kategori kustom, terdapat forum khusus dan upacara yang menjadi wadah

komunikasi tradisional bagi para pemangku kepentingan. Sementara itu, dalam kategori politik terdapat Kan/Lkaam sebagai lembaga adat formal dan bentuk transaksional yang menggambarkan pertukaran kepentingan politik. Struktur komunikasi yang berlapis ini menunjukkan bagaimana masyarakat Minangkabau mengadaptasi nilai-nilai tradisional mereka ke dalam konteks politik kontemporer sambil tetap mempertahankan esensi budaya yang telah mengakar.

Pola komunikasi struktural masyarakat Adat Minangkabau telah mengalami transformasi yang signifikan, terutama dalam aspek hierarki dan pengambilan keputusan. Perubahan ini terlihat dari empat pola utama, yaitu komunikasi top-down yang semakin instruktif, pemanfaatan forum Adat untuk kepentingan politik, pelembagaan lembaga adat yang dipolitisasi, dan munculnya pola transaksional berupa politik uang dan jual beli gelar Adat. Pergeseran ini tidak hanya mengubah karakteristik komunikasi adat yang seharusnya menjadi musyawarah mufakat, tetapi juga memberikan dampak yang mendasar terhadap sistem nilai dan kearifan lokal masyarakat Minangkabau. Berikut adalah struktur pola komunikasi yang terjadi.

Tabel 1 Pola Komunikasi Politik dalam Kepemimpinan Adat Minangkabau



Sumber: Olah Peneliti (2024)

Pola komunikasi politik dalam kepemimpinan adat Minangkabau dapat dianalisis baik melalui dimensi struktural maupun non-struktural, seperti yang diilustrasikan pada bagan organisasi. Analisis ini mengungkap interaksi kompleks antara otoritas budaya dan kekuasaan politik dalam masyarakat Minangkabau kontemporer. Dimensi struktural mencakup dua kategori utama: adat istiadat (adat) dan institusi politik. Komunikasi terkait adat beroperasi terutama melalui forum adat (forum adat) dan acara seremonial (upacara adat), yang secara historis berfungsi sebagai ruang musyawarah demokrasi tetapi semakin menjadi tempat mobilisasi politik. Para pemimpin tradisional memanfaatkan platform budaya ini untuk memberikan pengaruh terhadap anggota komunitas mereka.

Aspek forum adat terwujud melalui Pertemuan Adat Nagari (KAN) dan pertemuan adat lainnya di mana keputusan tentang urusan kemasyarakatan dibuat. Namun, forum-forum ini telah mengalami transformasi yang signifikan, dengan banyak yang sekarang berfungsi sebagai ruang konsolidasi politik daripada badan musyawarah yang asli. Dimensi upacara meliputi ritual dan upacara adat yang semakin dipolitisasi, khususnya melalui praktik-praktik seperti batagak penghulu (pelantikan pemimpin adat). Dimensi politik beroperasi melalui

lembaga formal seperti KAN / LKAAM (Lembaga Hubungan Adat Alam Minangkabau) dan hubungan transaksional. Lembaga-lembaga ini, meskipun awalnya dirancang untuk melestarikan nilai-nilai budaya, telah menjadi instrumen legitimasi dan mobilisasi politik. Para pemimpin tradisional sering memanfaatkan posisi mereka di dalam lembaga-lembaga ini untuk memajukan kepentingan politik.

Aspek transaksional mewakili perkembangan yang sangat memprihatinkan, yang ditandai dengan komodifikasi jabatan dan jabatan tradisional untuk tujuan elektoral. Ini termasuk praktik-praktik seperti jual beli hak milik tradisional (jual beli hak milik) dan pemberian keuntungan materi dengan imbalan dukungan politik. Pola komunikasi non-struktural muncul melalui jaringan dan hubungan informal, seringkali terwujud dalam interaksi pribadi dan negosiasi tidak resmi antara pemimpin adat dan anggota masyarakat. Pola-pola ini sering beroperasi berdampingan dan terkadang bertegangan dengan komunikasi struktural formal.

Hubungan antara pola komunikasi struktural dan non-struktural mencerminkan ketegangan yang lebih luas dalam masyarakat Minangkabau antara otoritas tradisional dan kekuatan politik modern. Pemimpin tradisional harus menavigasi kedua dimensi tersebut sambil berusaha mempertahankan legitimasi budaya dan pengaruh politik mereka.

Kerangka komunikasi yang kompleks ini berimplikasi signifikan terhadap pelestarian budaya dan pembangunan demokrasi di masyarakat Minangkabau. Sementara lembaga dan upacara tradisional terus menyediakan platform penting untuk interaksi masyarakat, meningkatnya politisasi mereka menimbulkan kekhawatiran tentang keberlanjutan sistem tata kelola tradisional dan kemampuan mereka untuk menjalankan fungsi budaya aslinya.

Transformasi pola komunikasi tradisional Minangkabau mengungkapkan perubahan struktural yang mendalam dalam bagaimana kekuatan budaya dan politik bersinggungan. Forum adat, yang dulunya merupakan ruang musyawarah demokrasi sejati yang berlandaskan prinsip musyawarah mufakat (mufakat), semakin menjadi ajang mobilisasi politik. Pergeseran ini secara fundamental mengubah hakikat pengambilan keputusan dalam masyarakat Minangkabau, di mana para pemimpin adat kini seringkali lebih mengutamakan kepentingan politik daripada pelestarian budaya.

Dimensi seremonial komunikasi Minangkabau telah mengalami politisasi yang signifikan, terutama terlihat dalam praktik-praktik seperti batagak penghulu (pelantikan pemimpin adat). Upacara-upacara ini, yang secara historis dirancang untuk memberikan legitimasi budaya dan memperkuat ikatan komunitas, sekarang sering kali berfungsi sebagai platform untuk jaringan politik dan demonstrasi kekuasaan. Komodifikasi upacara-upacara ini melalui praktik-praktik seperti jual beli gelar semakin mengikis maknanya.

KAN dan LKAAM, sebagai lembaga formal otoritas tradisional, semakin terjatuh dalam dinamika politik modern. Organisasi-organisasi ini, meski seolah-olah berfokus pada pelestarian nilai-nilai budaya Minangkabau, kini kerap berfungsi sebagai wahana mobilisasi politik dan pembangunan legitimasi. Para pemimpin tradisional memanfaatkan posisi mereka di dalam lembaga-lembaga ini untuk memajukan agenda politik, menciptakan jaringan hubungan yang kompleks yang mengaburkan batas antara otoritas budaya dan kekuatan politik.

Munculnya hubungan transaksional dalam kepemimpinan tradisional merupakan pergeseran mendasar dalam budaya politik Minangkabau. Pertukaran material dan tawar-menawar politik telah menjadi aspek normal dari suksesi kepemimpinan dan proses pengambilan keputusan. Komersialisasi otoritas tradisional ini tidak hanya merusak integritas budaya dari posisi kepemimpinan tetapi juga menciptakan dinamika kekuasaan baru yang mengutamakan sumber daya ekonomi daripada pengetahuan budaya dan pengabdian masyarakat.

Pola komunikasi non-struktural, yang beroperasi melalui jaringan informal dan hubungan pribadi, memainkan peran yang semakin penting dalam kehidupan politik Minangkabau. Saluran tidak resmi ini sering kali memfasilitasi negosiasi dan kesepakatan yang melewati proses musyawarah tradisional. Meskipun jaringan informal seperti itu selalu

ada di masyarakat Minangkabau, peran mereka saat ini dalam mobilisasi politik dan pengambilan keputusan merupakan penyimpangan yang signifikan dari praktik tradisional.

Ketegangan antara pola komunikasi struktural dan non-struktural mencerminkan tantangan yang lebih luas dalam mendamaikan otoritas tradisional dengan pemerintahan demokratis modern. Pemimpin tradisional harus menavigasi lanskap politik yang kompleks sambil berusaha mempertahankan legitimasi budaya. Tindakan penyeimbangan ini sering mengakibatkan nilai-nilai budaya yang dikompromikan dan institusi tradisional yang melemah, menimbulkan pertanyaan serius tentang masa depan sistem tata kelola tradisional Minangkabau. Meningkatnya politisasi saluran komunikasi baik formal maupun informal mengancam keberlanjutan praktik budaya yang secara historis menjadi landasan organisasi sosial Minangkabau.

Transformasi struktural komunikasi politik Minangkabau mencerminkan perubahan mendasar dalam bagaimana otoritas tradisional beroperasi dalam konteks demokrasi modern. Forum adat (forum adat) telah berkembang dari ruang musyawarah demokrasi sejati menjadi arena politik di mana para pemangku adat memanfaatkan otoritas budayanya untuk tujuan elektoral. Transformasi ini telah menciptakan dinamika yang kompleks dimana prinsip musyawarah mufakat (membangun konsensus) semakin tunduk pada pragmatisme politik. Pelembagaan pergeseran ini melalui badan-badan formal seperti KAN (Kesatuan Adat Nagari) dan LKAAM (Lembaga Kesatuan Adat Alam Minangkabau) telah menciptakan kerangka sistematis di mana otoritas budaya secara rutin diubah menjadi modal politik.

Dimensi seremonial komunikasi politik Minangkabau telah mengalami komersialisasi yang signifikan, terutama terlihat dalam praktik-praktik seputar batagak penghulu (pelantikan pemimpin adat). Upacara-upacara ini, yang secara historis dirancang untuk memberikan legitimasi budaya dan memperkuat ikatan komunitas, menjadi semakin transaksional. Munculnya (jual beli gelar tradisional) mewakili komodifikasi otoritas budaya yang mendalam, di mana modal ekonomi semakin menentukan akses ke posisi kepemimpinan tradisional. Komersialisasi ini telah menciptakan dinamika kekuasaan baru yang mengutamakan sumber daya keuangan daripada pengetahuan budaya dan pengabdian masyarakat, yang secara fundamental mengubah landasan tradisional legitimasi kepemimpinan dalam masyarakat Minangkabau.

Hubungan antara pola komunikasi struktural dan non-struktural mengungkapkan ketegangan yang mendalam dalam masyarakat Minangkabau kontemporer. Sementara lembaga formal seperti KAN dan LKAAM menyediakan saluran resmi untuk komunikasi politik dan pengambilan keputusan, jaringan informal dan hubungan pribadi seringkali memainkan peran yang sama pentingnya dalam mobilisasi dan negosiasi politik. Dualitas ini menciptakan jaringan interaksi yang kompleks di mana para pemimpin tradisional harus menavigasi persyaratan kelembagaan formal dan jaringan kekuasaan informal. Semakin pentingnya hubungan transaksional dalam konteks ini telah menyebabkan situasi di mana pertukaran material dan tawar-menawar politik telah menjadi aspek yang dinormalisasi dari pemerintahan tradisional.

Politisasi saluran komunikasi tradisional berimplikasi signifikan terhadap sistem matrilineal yang secara historis menjadi ciri masyarakat Minangkabau. Forum-forum tradisional yang dulunya berfungsi untuk melindungi hak-hak perempuan dan menjaga keseimbangan kekuasaan dalam struktur matrilineal semakin didominasi oleh kepentingan politik laki-laki. Dimensi gender dalam komunikasi politik ini merupakan tantangan khusus bagi keberlanjutan organisasi sosial tradisional Minangkabau, karena berpotensi merusak salah satu ciri budayanya yang khas. Transformasi pola komunikasi dengan demikian tidak hanya mempengaruhi proses politik tetapi juga mengancam aspek fundamental identitas budaya Minangkabau.

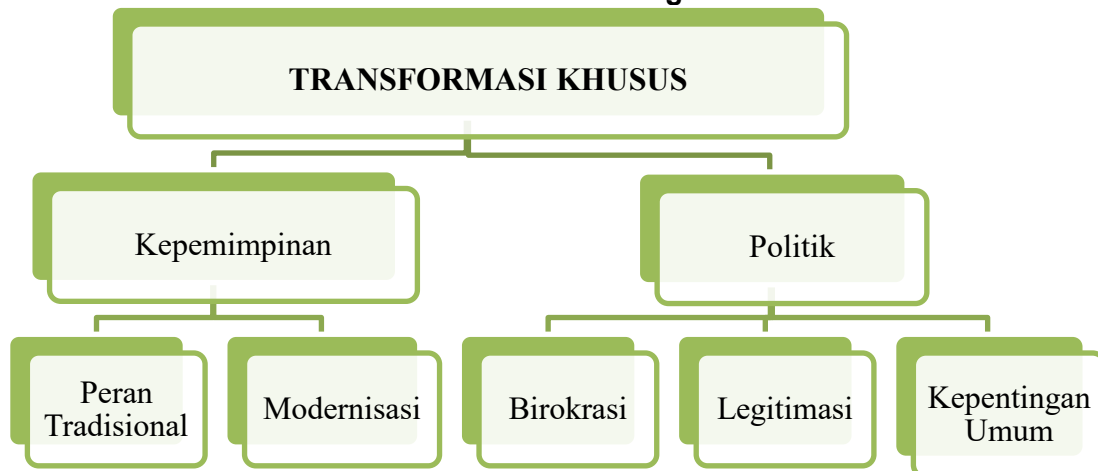
Dampak kumulatif dari perubahan pola komunikasi politik ini menimbulkan pertanyaan serius tentang masa depan tata kelola tradisional di masyarakat Minangkabau. Meningkatnya prevalensi hubungan transaksional dan pragmatisme politik di forum-forum tradisional

mengancam keaslian budaya dan efektivitas praktis lembaga-lembaga tersebut. Para pemimpin tradisional menghadapi tantangan yang terus meningkat dalam mempertahankan legitimasi budaya sambil terlibat dalam proses politik modern, menciptakan ketegangan yang berpotensi merusak seluruh sistem otoritas tradisional. Situasi ini menuntut pertimbangan yang cermat tentang bagaimana sistem pemerintahan tradisional dapat disesuaikan dengan konteks demokrasi modern tanpa kehilangan karakteristik budaya dan fungsi sosialnya yang esensial.

2. Peran pemangku kepentingan Adat dalam struktur politik lokal Minangkabau

Transformasi peran pemangku kepentingan Adat dalam struktur politik lokal Minangkabau mencerminkan dinamika kompleks antara sistem kepemimpinan tradisional dan tuntutan modernisasi. Dalam konteks ini, pemangku kepentingan adat menghadapi dualisme fungsi sebagai Penjaga nilai-nilai Adat serta aktor politik modern yang harus beradaptasi dengan sistem birokrasi kontemporer. Perubahan tersebut mencakup aspek kepemimpinan yang mencakup peran tradisional dalam musyawarah Adat dan penyelesaian konflik, serta modernisasi melalui penerapan teknologi baru dan sistem administrasi. Sedangkan dalam dimensi politik, transformasi ini melibatkan integrasi dengan sistem birokrasi formal, pembangunan legitimasi ganda (adat dan modern), serta peningkatan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Kompleksitas ini menciptakan tantangan dan peluang bagi pemangku kepentingan Pribumi untuk mempertahankan relevansi kepemimpinan tradisional sambil mengembangkan kapasitas untuk memenuhi tuntutan modernisasi.

Tabel 1.2 Transformasi Akting Khusus



Sumber: Olah peneliti (2024)

Transformasi pemimpin adat dalam masyarakat Minangkabau mencerminkan dinamika yang kompleks antara menjaga warisan budaya dan beradaptasi dengan sistem pemerintahan modern. Para pemimpin adat sekarang menghadapi peran ganda sebagai penjaga budaya dan aktor politik, yang mengharuskan mereka untuk menavigasi antara melestarikan adat istiadat leluhur sambil terlibat dengan tuntutan administrasi kontemporer. Dualitas ini telah menciptakan tantangan yang signifikan dalam menyeimbangkan tanggung jawab kepemimpinan tradisional dengan kewajiban politik modern, khususnya dalam proses pengambilan keputusan dan tata kelola masyarakat. Evolusi legitimasi kepemimpinan mewakili aspek penting lain dari transformasi ini.

Para pemimpin tradisional sekarang harus memperoleh otoritas mereka tidak hanya dari status turun-temurun dan pengakuan budaya tetapi juga dari kemampuan mereka untuk menunjukkan kompetensi dalam pemerintahan modern dan administrasi publik. Pergeseran ini telah mengubah secara mendasar bagaimana kredensial kepemimpinan dievaluasi, mengharuskan para pemimpin tradisional untuk mengembangkan keterampilan dan keahlian baru sambil mempertahankan pengetahuan dan otoritas budaya mereka. Transformasi

tersebut telah menghasilkan sistem validasi kepemimpinan yang lebih kompleks yang menggabungkan metrik legitimasi tradisional dan modern.

Mekanisme pengambilan keputusan dalam kepemimpinan tradisional telah mengalami perubahan signifikan untuk mengakomodasi persyaratan tata kelola modern. Sambil mempertahankan esensi dari proses pembangunan konsensus tradisional, para pemimpin sekarang harus mengintegrasikan prosedur administrasi formal dan standar birokrasi ke dalam pendekatan tata kelola mereka. Integrasi ini telah menghasilkan sistem hibrid yang berupaya melestarikan kearifan musyawarah tradisional sekaligus memenuhi tuntutan efisiensi dan akuntabilitas administrasi modern. Tantangannya terletak pada menjaga integritas proses pengambilan keputusan tradisional sambil beradaptasi dengan standar tata kelola kontemporer. Pelestarian nilai-nilai budaya menghadapi tantangan baru karena para pemimpin tradisional terlibat lebih dalam dalam politik formal. Waktu dan perhatian yang dicurahkan untuk kegiatan politik seringkali bersaing dengan peran mereka sebagai penjaga budaya, menciptakan ketegangan dalam transmisi pengetahuan dan nilai-nilai tradisional kepada generasi muda. Hal ini mengharuskan pengembangan pendekatan inovatif untuk pelestarian budaya, termasuk penggunaan teknologi modern dan metode dokumentasi sistematis untuk memastikan kelangsungan pengetahuan tradisional meskipun komitmen politik para pemimpin meningkat.

Transformasi tersebut juga berdampak pada hubungan antara pemimpin adat dan komunitasnya. Saat para pemimpin ini menavigasi antara peran budaya dan politik, mereka harus menjaga kredibilitas dan kepercayaan dalam komunitas mereka sambil terlibat dengan sistem politik yang lebih luas. Tanggung jawab ganda ini telah menciptakan dinamika baru dalam hubungan masyarakat, yang mengharuskan para pemimpin untuk menunjukkan kemampuan mereka untuk memajukan kepentingan masyarakat baik melalui jalur tradisional maupun modern. Tantangannya terletak pada mempertahankan kepemimpinan budaya yang otentik sambil berpartisipasi secara efektif dalam proses politik kontemporer. Modernisasi kepemimpinan tradisional memerlukan adaptasi yang signifikan dalam struktur organisasi dan peningkatan kapasitas. Lembaga-lembaga tradisional harus mengembangkan mekanisme baru untuk administrasi, dokumentasi, dan perencanaan suksesi yang sejalan dengan standar modern sambil menjaga integritas budaya. Hal ini menyebabkan munculnya model organisasi hibrida yang menggabungkan hierarki tradisional dengan sistem manajemen modern, menciptakan struktur kepemimpinan yang lebih kompleks tetapi berpotensi lebih efektif. Keberhasilan adaptasi ini sangat bergantung pada kemampuan untuk mempertahankan keaslian budaya sekaligus memenuhi tuntutan pemerintahan modern.

Integrasi kepemimpinan tradisional dengan sistem politik modern telah menciptakan tantangan baru dalam pengelolaan sumber daya dan pembangunan ekonomi. Pemimpin adat sekarang harus menyeimbangkan pendekatan adat dalam mengelola sumber daya komunal dengan tuntutan ekonomi kontemporer dan kebijakan pembangunan. Hal ini telah menghasilkan model hibrida inovatif dari tata kelola sumber daya yang menggabungkan kearifan tradisional dengan prinsip ekonomi modern. Tantangannya terletak pada memastikan pembangunan berkelanjutan sambil melestarikan sistem kepemilikan komunal dan nilai-nilai budaya yang melekat pada pengelolaan sumber daya.

Evolusi mekanisme resolusi konflik mewakili aspek penting lain dari transformasi kepemimpinan. Pemimpin adat sekarang harus mengintegrasikan metode penyelesaian sengketa adat dengan sistem hukum formal, menciptakan pendekatan manajemen konflik yang lebih kompleks tetapi berpotensi lebih efektif. Integrasi ini mengharuskan para pemimpin untuk mengembangkan keahlian dalam teknik mediasi tradisional dan prosedur hukum modern, sambil memastikan bahwa resolusi tetap sesuai secara budaya dan sah secara hukum. Keberhasilan sistem resolusi konflik hibrida ini sangat bergantung pada kemampuan para pemimpin untuk menavigasi antara kerangka keadilan tradisional dan modern.

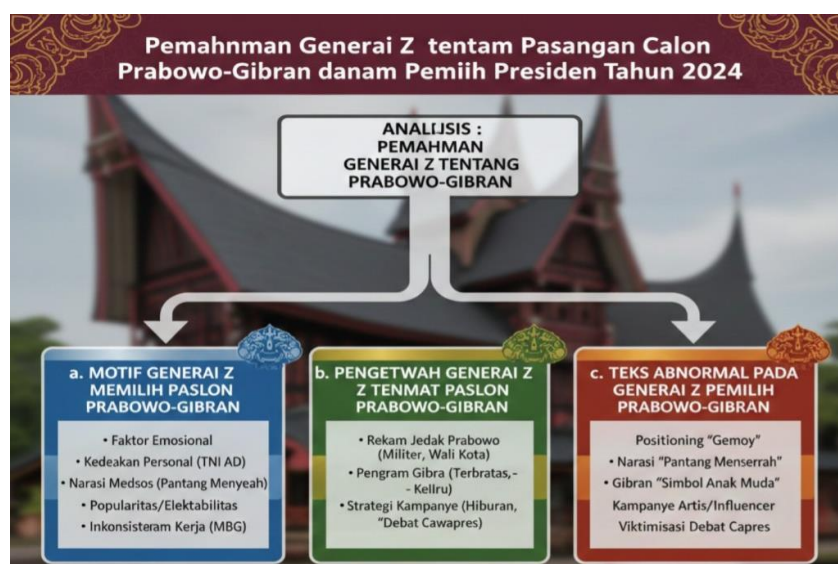
Adopsi teknologi dan transformasi digital telah menjadi elemen penting dalam memodernisasi kepemimpinan tradisional. Para pemimpin semakin memanfaatkan platform

digital untuk dokumentasi, komunikasi, dan keterlibatan masyarakat, sambil mempertahankan esensi tata kelola tradisional. Integrasi teknologi ini telah menciptakan peluang baru untuk melestarikan pengetahuan budaya, meningkatkan efisiensi administrasi, dan memperluas jangkauan masyarakat. Namun, hal itu juga menghadirkan tantangan dalam mempertahankan aspek personal dan seremonial kepemimpinan tradisional yang fundamental bagi identitas budaya. Transformasi sistem pendidikan dan pelatihan bagi para pemimpin tradisional masa depan menjadi semakin canggih. Program pengembangan kepemimpinan modern sekarang menggabungkan transmisi pengetahuan tradisional dengan keterampilan manajemen kontemporer, menciptakan pemimpin masa depan yang lebih menyeluruh. Program-program ini berfokus pada pelestarian kearifan budaya sambil mengembangkan kompetensi dalam administrasi publik, negosiasi politik, dan tata kelola modern. Evolusi dalam persiapan kepemimpinan ini mencerminkan semakin kompleksnya peran dan kebutuhan akan keahlian yang lebih komprehensif.

Penatalayanan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan telah muncul sebagai bidang kritis di mana kepemimpinan tradisional harus beradaptasi dengan tantangan kontemporer. Para pemimpin semakin dituntut untuk mengintegrasikan kearifan lingkungan tradisional dengan praktik konservasi modern dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Hal ini mengarah pada pendekatan inovatif yang menggabungkan pengetahuan leluhur tentang pengelolaan lingkungan dengan metode ilmiah dan standar lingkungan internasional. Tantangannya terletak pada menjaga hubungan ekologis tradisional sambil mengatasi tantangan lingkungan modern. Transformasi peran gender dan partisipasi dalam struktur kepemimpinan tradisional merupakan evolusi signifikan lainnya. Sambil menghormati norma-norma budaya, lembaga-lembaga tradisional secara bertahap beradaptasi untuk mengakomodasi kesetaraan gender yang lebih besar dan partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Transformasi ini membutuhkan keseimbangan yang cermat antara melestarikan nilai-nilai budaya dan menanggapi tuntutan modern akan inklusivitas dan kesetaraan representasi. Keberhasilan perubahan ini bergantung pada kemampuan untuk mengintegrasikan reformasi progresif dengan tetap menjaga keaslian budaya dan penerimaan masyarakat.

3. Pemahaman Generasi Z tentang Pasangan Calon Prabowo-Gibran dalam Pemilu Presiden Tahun 2024

Tabel 1.3 Kerangka Analisis Pemahaman Generasi Z terhadap Pasangan Prabowo-Gibran



Sumber: Olah peneliti (2024)

Pemahaman pemilih Generasi Z Kota Padang tentang pasangan Prabowo-Gibran yang dipilihnya pada Pilpres 2024 menunjukkan karakteristik yang didominasi oleh persepsi emosional akibat terpapar teks abnormal yang disebarluaskan melalui media sosial untuk kepentingan elektoral. Analisis mendalam terhadap 13 informan mengungkapkan bahwa pemahaman mereka terbentuk melalui proses internalisasi informasi yang bias, di mana motif memilih pasangan Prabowo-Gibran lebih didasarkan pada faktor emosional seperti perasaan kedekatan, simpati, dan ketertarikan pada kampanye hiburan daripada evaluasi rasional terhadap kualifikasi dan program kerja kandidat. Pengetahuan informan tentang kedua tokoh tersebut cenderung superfisial dan terbatas pada aspek kepopuleran, sementara pemahaman mereka terhadap program kerja, strategi kampanye, dan isu-isu sensitif seringkali keliru atau tidak komprehensif. Fenomena ini mencerminkan kegagalan dalam mencapai pemahaman yang objektif dan kritis, yang seharusnya menjadi fondasi pengambilan keputusan politik yang rasional dalam sistem demokrasi yang sehat.

a. Motif Generasi Z Memilih Pasangan Calon Prabowo-Gibran pada Pemilihan Presiden Tahun 2024

Motif pemilih Generasi Z dalam memilih pasangan Prabowo-Gibran menunjukkan dominasi faktor emosional dan kedekatan personal dibandingkan pertimbangan rasional berbasis program dan kualifikasi kandidat. Faktor kondisi awal pemilih, khususnya latar belakang keluarga yang bekerja sebagai TNI AD, menjadi pengaruh signifikan bagi 4 dari 13 informan dalam menentukan pilihan politik mereka. ADW, ARS, WTS, dan RF mengakui adanya kedekatan emosional dengan Prabowo karena sama-sama memiliki background militer, menciptakan sense of belonging yang mempengaruhi preferensi politik mereka. Sebagaimana diungkapkan RF (21 Tahun):

"Capres 02 kan bapak Menteri pertahanan kan kak, aku lebih suka yang berbau TNI sih kak."

Pernyataan ini menunjukkan bahwa identitas kelompok dan kedekatan sosio-kultural menjadi faktor determinan dalam pilihan politik, yang sejalan dengan teori pemilih tradisional yang mendasarkan keputusan pada kesamaan latar belakang dan sistem nilai.

Pengaruh media massa, khususnya narasi yang disebarluaskan melalui media sosial, menjadi faktor kedua yang membentuk motif pemilih Generasi Z. Narasi tentang Prabowo sebagai sosok yang *"pantang menyerah"* dan *"gigih demi rakyat"* berdasarkan perjuangan politiknya yang berulang kali mencalonkan diri dalam pilpres, berhasil membangun simpati di kalangan informan. MO menyatakan kekagumannya terhadap *"keikhlasan"* Prabowo yang dinilai konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat meskipun berulang kali mengalami kekalahan. Narasi romantisasi perjuangan politik ini diperkuat dengan cerita tentang *"perjuangan cinta"* Prabowo untuk membuktikan diri kepada mantan mertuanya, yang menciptakan dimensi emosional yang menarik bagi generasi muda. Analisis konten media sosial menunjukkan bahwa narasi-narasi ini memang masif disebarluaskan di platform TikTok sebagai bagian dari strategi kampanye digital untuk membangun *emotional connection* dengan pemilih muda.

Faktor popularitas dan elektabilitas kandidat juga menjadi motif pragmatis bagi sebagian informan yang memilih Prabowo-Gibran karena dinilai sebagai kandidat terkuat dengan peluang kemenangan tertinggi. KAP mengungkapkan kalkulasi politiknya:

"Alasannya kalau untuk jujur-jujuran aku menilai kalau Prabowo itu sangat pantas jadi presiden karena latar belakangnya itu cukup banyak kak, seperti jendral... Simpelnya dia seornag kandidat terbaik."

Motif ini mencerminkan perilaku pemilih pragmatis yang mementingkan kepuasan personal dari mendukung kandidat yang berpeluang menang, meskipun tidak selalu didasari pemahaman mendalam tentang program kerja atau visi-misi

kandidat. Melalui data survei elektabilitas menunjukkan bahwa persepsi tentang "*kandidat terkuat*" ini memang terbentuk melalui pemberitaan media dan hasil-hasil polling yang konsisten menempatkan Prabowo-Gibran di posisi teratas.

Motif yang mengejutkan adalah inkonsistensi antara pernyataan verbal informan tentang pentingnya program kerja dengan pengetahuan faktual mereka tentang program tersebut. ESA, NM, dan EN mengaku memilih Prabowo-Gibran karena tertarik dengan visi-misi dan program kerjanya, namun ketika ditanya secara spesifik, mereka hanya mengetahui program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan itupun dengan pemahaman yang seringkali keliru. ESA bahkan mengaku menentang program MBG karena berpotensi korupsi, meskipun dia menyatakan bahwa program kerja menjadi salah satu alasan memilih pasangan tersebut. Inkonsistensi ini menunjukkan adanya post-hoc rationalization, di mana informan berusaha memberikan justifikasi rasional terhadap pilihan yang sebenarnya didasari faktor emosional. Fenomena ini mencerminkan belum matangnya kesadaran politik informan dan ketidakmampuan mereka untuk mengintegrasikan preferensi emosional dengan pertimbangan substantif.

Secara keseluruhan, motif Generasi Z pemilih Prabowo-Gibran mencerminkan karakteristik pemilih tradisional yang mendasarkan keputusan pada faktor-faktor non-rasional seperti kedekatan emosional, identitas kelompok, dan popularitas kandidat. Dominasi motif emosional ini menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan politik mereka belum didasari oleh evaluasi kritis terhadap kapabilitas, integritas, dan program kerja kandidat yang seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam sistem demokrasi yang sehat. Pembeneran data melalui observasi perilaku online dan analisis konten media sosial mengkonfirmasi bahwa informan lebih responsif terhadap konten yang membangun emotional engagement daripada konten yang menyajikan analisis substantif tentang kebijakan publik. Kondisi ini mencerminkan tantangan serius dalam upaya membangun budaya politik yang rasional dan kritis di kalangan generasi muda Indonesia.

b. Pengetahuan Generasi Z tentang Pasangan Calon Prabowo-Gibran yang Dipilih pada Pemilihan Presiden 2024

Pengetahuan Generasi Z tentang sosok Prabowo Subianto menunjukkan fokus pada aspek rekam jejak karir militer dan politik yang telah membentuk citra popularitasnya di mata publik. Seluruh informan mengetahui latar belakang militer Prabowo sebagai mantan Jenderal TNI AD dan Danjen Kopassus, serta perjalanan politiknya yang panjang dalam berbagai kontestasi pilpres sejak 2004. Pengetahuan mereka tentang Prabowo umumnya dipicu sejak Pilpres 2019 ketika berkompetisi melawan Jokowi, dan semakin menguat setelah Prabowo menjadi Menteri Pertahanan pada periode kedua pemerintahan Jokowi. NM mengungkapkan:

"Bapak Prabowo Subianto kan Menteri Pertahanan, dan juga bapak itu background nya TNI angkatan darat dan dari pasukan khusus juga. Bapak itu kinerjanya bagus, orangnya juga tegas."

Citra yang terbentuk adalah sosok yang tegas, gigih, dan pantang menyerah, yang dikonstruksi melalui narasi perjuangan politik panjangnya. Perihal melalui analisis konten media sosial menunjukkan bahwa citra positif ini memang sengaja dibangun melalui kampanye digital yang masif di platform-platform yang diakses generasi muda.

Sebaliknya, pengetahuan informan tentang Gibran Rakabuming Raka cenderung terbatas dan awalnya bernuansa negatif karena statusnya sebagai anak Presiden Jokowi dan kontroversi pencalonannya. Seluruh informan mengetahui bahwa Gibran adalah anak Jokowi dan pernah menjabat sebagai Wali Kota Surakarta, namun pengetahuan mendalam tentang prestasi kepemimpinannya di Solo relatif minim. SMN mengungkapkan kesan pertamanya:

"Pertama kali tahu Gibran waktu jadi cawapres kemarin... Pertama kali lihatnya kayak orang linglung gitu, tampangnya itu lo. Jadi aku mikir loh kok kayak gini gak ada tegas-tegasnya."

Pandangan skeptis ini kemudian berubah setelah menyaksikan performa Gibran dalam debat cawapres, yang dinilai mampu mengubah persepsi negatif menjadi lebih positif. Perubahan persepsi ini menunjukkan bahwa pengetahuan informan tentang kandidat sangat dipengaruhi oleh momen-momen viral dan performance politik daripada track record kepemimpinan yang substantif.

Pemahaman informan tentang program kerja pasangan Prabowo-Gibran menunjukkan keterbatasan yang signifikan, dengan hampir seluruh informan hanya mengetahui program Makan Bergizi Gratis (MBG) tanpa pemahaman komprehensif tentang program-program lainnya. Yang lebih mengkhawatirkan, pemahaman mereka tentang program MBG seringkali keliru dalam hal tujuan dan target penerima program. Beberapa informan seperti NR, WTS, RF, dan NM keliru memahami bahwa program ini ditujukan untuk mengatasi kemiskinan, padahal tujuan utamanya adalah pencegahan stunting. NM bahkan menyatakan:

"Kalau paslon 02 punya program kerja yang memberi makan dan susu gratis... banyak dari masyarakat kita yang untuk makan aja susah, seperti pekerja di luar sana kayak pemulung, ojol yang tidak dapat orderan."

Kesalahpahaman ini menunjukkan bahwa informasi tentang program kerja yang mereka terima melalui media sosial tidak akurat atau telah terdistorsi. Dokumen resmi program kerja Prabowo-Gibran mengkonfirmasi bahwa informasi yang beredar di media sosial memang seringkali tidak sesuai dengan dokumen asli.

Pengetahuan informan tentang strategi kampanye pasangan Prabowo-Gibran menunjukkan ketertarikan tinggi terhadap aspek hiburan dan viral, khususnya fenomena "gemoy" yang menjadi positioning utama kampanye digital mereka. Seluruh informan familiar dengan kampanye "gemoy", joget gemoy, dan keterlibatan artis-influencer dalam mendukung pasangan ini. ARS mengungkapkan:

"Aku lebih tahu kampanye di medsos sih kak, kayak di TikTok itu banyak video-video mereka yang dibikin jedag-jedug, goyang-goyang... Selain itu palingan yang gemoy itu kak. Aku lihatnya juga gemoy sih."

Respons positif mereka terhadap kampanye hiburan ini mencerminkan preferensi generasi digital terhadap konten yang entertaining dibandingkan substansif. Namun, hal ini juga menunjukkan bahwa perhatian mereka teralihkan dari aspek-aspek penting seperti visi-misi, program kerja, dan kapabilitas kepemimpinan kandidat. Hal ini menunjukkan bahwa strategi kampanye berbasis hiburan ini memang efektif dalam menarik perhatian generasi muda, namun berpotensi mengurangi kualitas evaluasi politik mereka.

Secara keseluruhan, pengetahuan Generasi Z tentang pasangan Prabowo-Gibran yang mereka pilih menunjukkan karakteristik yang superfisial dan bias, di mana aspek popularitas dan daya tarik emosional lebih dominan daripada pemahaman substantif tentang kualifikasi, pengalaman, dan program kerja kandidat. Keterbatasan pengetahuan ini diperparah oleh ketergantungan mereka terhadap media sosial sebagai sumber informasi utama, yang cenderung menyajikan informasi dalam format singkat dan seringkali tidak akurat. Fenomena ini mencerminkan tantangan serius dalam upaya membangun electoral literacy di kalangan generasi muda, di mana kemampuan mengakses informasi tidak otomatis diikuti dengan kemampuan menganalisis dan mengevaluasi informasi tersebut secara kritis. melalui berbagai sumber mengkonfirmasi bahwa pola pengetahuan yang superfisial ini tidak hanya terjadi pada sampel penelitian, namun merupakan fenomena yang lebih luas di kalangan pemilih muda Indonesia dalam Pilpres 2024.

c. Teks Abnormal pada Generasi Z Pemilih Pasangan Calon Prabowo-Gibran pada Pemilihan Presiden Tahun 2024

Positioning "gemoy" sebagai strategi kampanye utama pasangan Prabowo-Gibran merupakan manifestasi teks abnormal yang paling signifikan dalam mempengaruhi persepsi Generasi Z pemilih. Transformasi citra Prabowo dari sosok militer yang tegas dan keras menjadi figur yang lucu dan menggemaskan menciptakan inkonsistensi fundamental yang tidak disadari oleh pelakunya maupun audiensnya. Perubahan drastis ini terkesan artificial dan tidak mencerminkan kepribadian asli Prabowo yang telah ditunjukkan selama puluhan tahun karir politik dan militernya. ESA mengungkapkan:

"Bagiku kampanyenya ini menghibur ya, maksudnya kadang kan kita mikir politik ini serius banget. Menurutku dengan ada lagu dan goyang gemoy cukup menghibur... Perubahan dia jadi gemoy menurutku namanya juga kampanye ya pasti dia narik suara."

Meskipun informan menyadari bahwa ini adalah strategi kampanye, mereka tetap terpengaruh dan bahkan terhibur oleh teks abnormal ini, yang menunjukkan efektivitas manipulasi emosi melalui konten yang menyenangkan namun menyesatkan substansi politik

Narasi "Prabowo sosok yang pantang menyerah demi rakyat" merupakan bentuk teks abnormal kedua yang berhasil membangun simpati emosional tanpa dasar faktual yang kuat. Konstruksi narasi ini mengromantisasi kegagalan berulang Prabowo dalam pilpres sebagai bentuk pengabdian dan perjuangan untuk rakyat, padahal motivasi sebenarnya bisa jadi lebih kompleks dan personal. SMN mengungkapkan:

"Tengok Prabowo udah mencalonkan saat Jokowi udah dua kali periode, tapi Prabowo tetap maju, maju, maju terus. Jadi pikiran aku oh ini berarti perjuangannya cintanya."

Narasi ini bahkan diperkuat dengan cerita romantis tentang "perjuangan cinta" untuk membuktikan diri kepada mantan mertua, yang sama sekali tidak relevan dengan kualifikasi kepemimpinan politik. RF juga terpengaruh narasi serupa:

"Bagi aku capresnya pantang menyerah sih kak, karena udah beberapa kali gagal mencalonin diri gitu... jadi kayaknya sekarang ini giliran dia."

Teks abnormal ini berhasil mengalihkan evaluasi politik dari aspek kompetensi dan integritas menuju aspek emosional yang tidak relevan dengan tugas kepresidenan. Framing Gibran sebagai "representasi dan simbol anak muda" menjadi teks abnormal ketiga yang digunakan untuk menetralkan kritik terhadap kontroversial pencalonannya. Narasi ini berhasil mengubah persepsi negatif tentang nepotisme dan pelanggaran etik menjadi sesuatu yang positif dan representatif bagi generasi muda. NM mengungkapkan:

"Alasan ketiga terkait wakilnya sih kak, menurutku tidak ada salahnya bagi generasi muda, seperti millennial masuk ke ranah politik karena pemikiran yang fresh itu perlu... ini juga membuktikan bahwa anak muda tidak hanya bisa berandai-andai saja."

ESA juga terpengaruh narasi serupa dalam mengatasi keraguan awalnya:

"Selagi yang muda masih bisa melakukan sesuatu buat negara ini kenapa enggak. Siapa tahu dengan peraturan ini, banyak anak bangsa yang muda-muda ini yang bisa mimpin negara ini menjadi lebih baik."

Teks abnormal ini berhasil mengaburkan perbedaan antara representasi generasi muda yang legitimate dengan nepotisme politik yang bermasalah, sehingga informan tidak lagi mempersoalkan aspek etika dan konstitusionalitas dalam pencalonan Gibran.

Kampanye berbasis hiburan dengan melibatkan artis dan influencer terkenal menciptakan teks abnormal yang mengaburkan batas antara politik substantif dengan

entertainment. Strategi ini berhasil menarik perhatian Generasi Z namun mengalihkan fokus mereka dari evaluasi kritis terhadap program dan kualifikasi kandidat menuju aspek hiburan yang tidak relevan dengan governance. MO mengakui:

"02 itu banyak artis-artis yang mendukungnya, itu mungkin salah satu caranya. Paslon lain kan juga gandeng artis, tapi tidak sebanyak 02."

Keterlibatan figur-figur populer seperti Raffi Ahmad, Kiky Saputri, dan artis lainnya menciptakan emotional connection yang mengaburkan penilaian objektif terhadap kandidat. Konten kampanye yang melibatkan selebriti mendapat engagement jauh lebih tinggi dibandingkan konten yang membahas program kerja atau track record kandidat, menunjukkan efektivitas teks abnormal dalam mengalihkan perhatian publik dari substansi politik.

Narasi "penyudutan Prabowo dalam debat capres" merupakan teks abnormal terakhir yang berhasil membangun simpati melalui viktimisasi yang tidak akurat. Interpretasi bahwa Prabowo "disudutkan" oleh dua kandidat lain dalam debat capres sebenarnya tidak objektif, karena dalam debat politik memang wajar terjadi saling kritik dan pertanyaan kritis, terutama mengenai track record jabatan yang sedang diemban. SMN mengungkapkan:

"Saat debat itu aku juga sedih lihatnya. Kayak ngapain sih mereka kayak gitu, padahal dia lebih tua terus dia juga gak ngapa-ngapain... justru karena itu orang makin banyak mau milih dia."

NM juga terpengaruh narasi serupa:

"Ketika debat aku kurang suka dengan 01 ini kak yang menyerang personal paslon lain, seperti merendahkan bapak Prabowo Subianto dan Gibran."

Teks abnormal ini berhasil mengubah proses debat politik yang seharusnya menjadi arena evaluasi kritis menjadi drama emosional yang memicu simpati, sehingga mengaburkan kemampuan informan untuk menilai substansi argumen dan performa debat secara objektif.

d. Dinamika Gender dan Maskulinisasi Kekuasaan dalam Sistem Matrilineal

Sistem matrilineal Minangkabau secara historis menempatkan perempuan sebagai pemilik garis keturunan dan pengelola harta pusaka, melalui peran simbolik dan sosial seperti bundo kanduang. Namun, dalam praktik kepemimpinan adat kontemporer, ruang pengambilan keputusan yang seharusnya inklusif semakin menyempit. Forum adat yang dahulu menjadi arena deliberasi kolektif kini lebih didominasi oleh figur laki-laki, terutama ketika forum tersebut dipolitisasi untuk kepentingan elektoral. Pergeseran ini menciptakan paradoks: meskipun perempuan memiliki otoritas kultural, pengaruh mereka terhadap kebijakan adat dan politik nagari semakin terbatas.

Politisasi lembaga adat seperti KAN dan LKAAM memperkuat dominasi laki-laki dalam struktur pengambilan keputusan. Maskulinisasi ini tampak dari pola komunikasi yang bersifat top-down, di mana keputusan strategis sering diambil oleh elite laki-laki tanpa melibatkan suara perempuan secara substantif. Praktik jual-beli gelar penghulu dan relasi transaksional semakin menggeser legitimasi dari basis kultural ke basis ekonomi, yang secara tidak langsung meminggirkan perempuan karena akses mereka terhadap modal politik dan finansial lebih terbatas. Akibatnya, prinsip musyawarah mufakat yang menjadi ciri khas budaya Minangkabau mengalami erosi.

Marginalisasi perempuan dalam forum adat berdampak pada kualitas keputusan yang dihasilkan. Banyak kebijakan adat yang menyangkut pengelolaan sumber daya komunal dan tata ruang nagari tidak lagi mencerminkan kepentingan rumah tangga matrilineal. Hal ini menimbulkan ketegangan sosial karena nilai-nilai yang seharusnya melindungi keseimbangan gender terabaikan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan reformasi tata tertib forum adat yang menjamin hak bicara

setara, kuota representasi perempuan, serta mekanisme keberatan formal terhadap keputusan yang bias gender.

Wawancara dengan salah satu informan perempuan adat mengungkapkan realitas ini:

"Sekarang kalau rapat adat, kami bundo kanduang hanya duduk di belakang. Bicara pun jarang diberi kesempatan, padahal keputusan itu menyangkut rumah kami juga." (Informan, 45 tahun).

Penjelasan ini menegaskan bahwa peran perempuan dalam forum adat lebih bersifat simbolik daripada substantif. Tanpa intervensi struktural, maskulinisasi kekuasaan akan terus mengikis karakter inklusif sistem matrilineal Minangkabau.

Marginalisasi perempuan dalam forum adat berdampak pada kualitas keputusan yang dihasilkan, terutama terkait pengelolaan sumber daya komunal dan tata ruang nagari. Ketegangan ini semakin jelas ketika informan lain menyatakan: "

"Kalau soal gelar penghulu, kami tidak pernah dilibatkan. Semua urusan itu laki-laki yang atur, kami hanya diberi tahu setelah selesai." (Informan, 50 tahun).

Pernyataan ini menghubungkan fenomena maskulinisasi dengan komodifikasi gelar adat, yang menggeser legitimasi dari basis kultural ke basis ekonomi. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan reformasi tata tertib forum adat yang menjamin hak bicara setara, kuota representasi perempuan, serta mekanisme keberatan formal terhadap keputusan yang bias gender.

Transformasi pola komunikasi politik dalam kepemimpinan adat Minangkabau mencerminkan kompleksitas interaksi antara sistem tradisional dan modernitas. Melalui teori konstruksi sosial (Berger & Luckmann, 1991), realitas sosial dipahami melalui tiga momen dialektis: eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Dalam konteks ini, pemangku adat Minangkabau mengeksternalisasi peran mereka melalui adaptasi terhadap sistem politik modern, mengalami objektivasi melalui institusionalisasi peran ganda mereka, dan menginternalisasi identitas baru sebagai aktor politik-budaya. Hal ini terlihat dari bagaimana forum-forum adat yang awalnya berfungsi sebagai ruang musyawarah demokratis telah bertransformasi menjadi arena negosiasi kepentingan politik.

Dalam perspektif etnografi kritis yang dikembangkan oleh (Madison, 2019) dalam "Critical Ethnography: Method, Ethics, and Performance", politisasi lembaga adat seperti KAN dan LKAAM menunjukkan pergeseran fundamental dalam relasi kekuasaan tradisional. Madison menekankan bahwa "etnografi kritis harus mengungkap struktur kekuasaan yang tersembunyi dan bagaimana struktur tersebut mempengaruhi kehidupan sehari-hari." Fenomena ini terlihat dari bagaimana posisi pemangku adat kini memiliki dualisme peran - sebagai penjaga tradisi sekaligus aktor politik yang harus bernegosiasi dengan sistem demokrasi modern.

Munculnya pola komunikasi transaksional dalam bentuk politik uang dan jual beli gelar adat mengindikasikan erosi nilai-nilai tradisional Minangkabau. (Berger & Luckmann, 1991) menjelaskan bahwa "legitimasi menghasilkan makna-makna baru yang berfungsi untuk mengintegrasikan makna-makna yang sudah diberikan kepada proses-proses kelembagaan yang berlainan." Proses legitimasi baru ini mencerminkan bagaimana nilai-nilai komersial mulai menggeser prinsip musyawarah mufakat yang menjadi pondasi sistem adat Minangkabau.

Konstruksi identitas, transformasi peran pemangku adat menunjukkan proses adaptasi yang kompleks terhadap tuntutan modernisasi. (Thomas, 1993) dalam "Doing Critical Ethnography" menegaskan pentingnya menganalisis "bagaimana kekuasaan dan ideologi membentuk kesadaran dan perilaku sosial." Para pemimpin adat harus merekonstruksi legitimasi mereka tidak hanya berdasarkan otoritas tradisional, tetapi juga melalui kemampuan mereka dalam mengakses dan memanfaatkan sumber daya politik modern.

Dinamika gender dalam struktur kepemimpinan adat juga mengalami pergeseran signifikan. (Berger & Luckmann, 1991:94) menjelaskan bahwa "identitas dibentuk oleh proses-

proses sosial dan, begitu memperoleh bentuknya, dipelihara, dimodifikasi, atau malahan dibentuk ulang oleh hubungan-hubungan sosial." Sistem matrilineal yang menjadi karakteristik unik masyarakat Minangkabau menghadapi tantangan serius ketika berhadapan dengan maskulinisasi politik modern.

Implikasi dari transformasi ini terhadap keberlanjutan sistem adat Minangkabau sangat kompleks. (Madison, 2019) menekankan pentingnya "memahami bagaimana kekuasaan beroperasi dalam konteks budaya spesifik dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi kehidupan sehari-hari." Di satu sisi, adaptasi terhadap sistem politik modern memungkinkan pemangku adat untuk tetap relevan dalam konteks kontemporer. Namun di sisi lain, komodifikasi peran dan status adat mengancam integritas dan autentisitas sistem nilai tradisional.

Transformasi peran pemangku adat Minangkabau dalam konteks politik modern telah menciptakan dilema fundamental dalam pelestarian nilai-nilai tradisional. Di satu sisi, keterlibatan mereka dalam politik formal memungkinkan representasi kepentingan adat dalam pengambilan keputusan di tingkat pemerintahan. Namun di sisi lain, politisasi peran adat ini telah mengakibatkan erosi bertahap pada otentisitas dan integritas sistem nilai tradisional. Forum-forum adat yang seharusnya menjadi ruang deliberasi komunal telah berubah menjadi arena tawar-menawar politik, di mana kepentingan pribadi dan kelompok seringkali mengalahkan kepentingan kolektif masyarakat. Praktik jual beli gelar adat dan politik uang telah mengkomersialisasi institusi yang seharusnya menjadi penjaga nilai-nilai luhur Minangkabau, menciptakan preseden berbahaya bagi keberlanjutan sistem adat.

Maskulinisasi politik dalam sistem matrilineal Minangkabau menimbulkan paradoks tersendiri dalam evolusi kepemimpinan adat. Meskipun secara historis masyarakat Minangkabau menganut sistem matrilineal yang memberikan posisi penting bagi perempuan dalam struktur sosial, infiltrasi politik modern justru memperkuat dominasi laki-laki dalam pengambilan keputusan komunal. Forum-forum adat yang seharusnya menjamin representasi kepentingan perempuan semakin didominasi oleh kepentingan politik patriarkal, menciptakan kesenjangan antara ideal budaya dan realitas praktik. Pergeseran ini tidak hanya mengancam karakteristik unik sistem sosial Minangkabau tetapi juga berpotensi mengakibatkan marginalisasi suara dan kepentingan perempuan dalam proses pembangunan komunitas (Syafiola & Ziqri, 2025).

Tantangan terbesar yang dihadapi oleh masyarakat Minangkabau kontemporer adalah menemukan keseimbangan antara modernisasi dan pelestarian nilai-nilai tradisional. Institusionalisasi peran ganda pemangku adat sebagai penjaga tradisi dan aktor politik membutuhkan mekanisme check and balance yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan erosi nilai-nilai adat. Diperlukan reformasi sistematis dalam tata kelola adat yang mampu mengakomodasi tuntutan modernisasi sambil mempertahankan esensi musyawarah mufakat dan nilai-nilai komunal. Hal ini mencakup penguatan sistem akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya adat, transparansi dalam pengambilan keputusan, serta revitalisasi peran perempuan dalam struktur kepemimpinan tradisional. Tanpa adaptasi yang terencana dan dikelola dengan baik, sistem adat Minangkabau berisiko kehilangan relevansinya atau terdegradasi menjadi sekadar instrumen politik tanpa makna budaya yang substantif.

SIMPULAN

Komunikasi politik pemangku adat Minangkabau mencerminkan kompleksitas dinamika antara pelestarian budaya dan modernisasi dalam struktur kepemimpinan tradisional. Penelitian ini mengungkapkan pergeseran signifikan dalam pola komunikasi adat, dari yang semula bersifat musyawarah mufakat menjadi top-down dan instruktif, ditandai dengan politisasi forum adat (KAN/LKAAM), pelembagaan lembaga adat untuk kepentingan elektoral, dan munculnya hubungan transaksional berupa politik uang serta jual beli gelar adat. Perubahan peran pemangku adat dari penjaga nilai tradisional menjadi aktor politik modern telah menciptakan dualisme fungsi yang menantang keberlanjutan sistem tata kelola tradisional, terutama dalam aspek pengambilan

keputusan dan legitimasi kepemimpinan. Dimensi gender mengalami paradoks tersendiri, di mana sistem matrilineal yang secara historis memberikan posisi penting bagi perempuan kini menghadapi maskulinisasi kekuasaan akibat infiltrasi politik modern yang mendominasi forum-forum adat. Komersialisasi otoritas tradisional melalui praktik transaksional tidak hanya mengikis integritas budaya dari posisi kepemimpinan, tetapi juga mengancam autentisitas musyawarah mufakat sebagai pondasi sistem adat Minangkabau, sehingga menimbulkan pertanyaan serius tentang masa depan tata kelola tradisional dalam konteks demokrasi modern.

SARAN

Untuk menjembatani kesenjangan antara tradisi dan modernitas, diperlukan reformasi sistematis dalam tata kelola adat Minangkabau. Saran utama adalah mengembangkan mekanisme tata kelola yang transparan dan akuntabel, yang mampu mengakomodasi tuntutan modernisasi sambil mempertahankan esensi musyawarah mufakat dan nilai-nilai komunal. Hal ini mencakup penguatan sistem akuntabilitas, peningkatan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, serta penciptaan kerangka kerja yang melindungi integritas budaya Minangkabau dari kepentingan politik pragmatis.

DAFTAR PUSTAKA

- Asnan, G. (2007). *Memikir ulang regionalisme: Sumatera Barat tahun 1950-an*. Yayasan Obor Indonesia.
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1991). *The social construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge*. Penguin Books.
- Creswell, J. W. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Havifi, I., Marta, R., & Sari, L. P. (2023). Model Komunikasi Humas Pemerintah Nagari (Studi pada Nagari III Koto Aur Malintang sebagai Nagari Berprestasi Informatif di Provinsi Sumatera Barat). *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 10(1), 299–308.
- Hidayat, Y., Febriyanto, I. I., & Nadzir, M. H. (2017). Transformasi dan Dualisme Kelembagaan dalam Pemerintah Adat Minang: Studi terhadap Nagari Pariangan, Sumatera Barat. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 2(2), 227–245.
- Kurnia, L., Sarmiati, S., & Arif, E. (2022). Komunikasi politik anggota DPRD provinsi Sumatera Barat dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. *Ensiklopedia of Journal*, 5(3), 77–91.
- Madison, D. S. (2019). *Critical ethnography: Method, ethics, and performance* (3rd ed.). Sage publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif (Revised ed.)*. PT Remaja Rosdakarya.
- Philipus, N. (2018). Komunikasi Bisnis Yang Etis: Sebuah Tinjauan Kritis. *Jurnal Komunikasi Dan Bisnis*, 6(2).
- Putri, D. K., & Hidayat-sardini, N. (2022). Budaya Matrilineal Dalam Keterwakilan Perempuan Di Legislatif Daerah Kota Bukittingi. *Journal of Politic and Government Studies*, 11(3), 351–364.
- Srisaparmi, S., & Fitriasia, A. (2024). Nilai Filsafat Kato Nan Ampek dalam Komunikasi Masyarakat Minangkabau. *Journal of Education Research*, 5(2), 1817–1822.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono, S., & Lestari, P. (2021). *Metode penelitian komunikasi (Kuantitatif, kualitatif, dan cara mudah menulis artikel pada jurnal internasional)*. Alfabeta Bandung, CV.
- Syafiola, M. F., & Ziqri, M. (2025). Realignment Politik Pasca Pilkada di Sumatera Barat. *Jurnal Niara*, 18(1), 146–158.
- Thomas, J. (1993). *Doing critical ethnography*. SAGE Publications.
- Witrianto, A., & Arfinal, S. S. (2018). *Tradisi dan Pola Makan Masyarakat Tradisional Minangkabau di Kubuang Tigobaleh*. Retrieved from Document Repository Universitas Andalas: <http://repo.unand>.